

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al Munawwir, Krapyak, Yagyakarta, 1984.
- Alisuf Sabri, *Hukuman dalam dunia pendidikan*, aksara, Jakarta, 2000.
- Ananda S. dan S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika Putra Press, 2010).
- Andi Hamzah, 1986, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Abu Abdul Halim Ahmad. S, *Bahaya Rasuah Kepada Masyarakat Menurut Islam*, Pustaka Syuhada, Kuala Lumpur, 1998.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- Bambang Poernomo, *Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan yang Bersih KKN dan Negara Demokrasi Kerakyatan*, Makalah, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Cecep Jambak, *Sulit Hukum Mati Koruptor*, Mengenang Artidjo Alkostar, <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/984074/sulit-hukum-mati-koruptor-mengenang-artidjo-alkostar>, Diakses Pada 15 September 2022.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Citr ditya Bakti, 2002).
- Indonesia Corruption Watch, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2017, Vonis Pengadilan Untungkan Koruptor*, ICW, Jakarta, 2018.
- Indonesia Corruption Watch (2018b) *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*. Jakarta: ICW Press.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media, 2012).
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2009).
- Joejono, *Fungsi Analisis Hukum dan Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

- John M. Echole dan Hasan SG6hadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).
- Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta, 1995.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: PT. Sofmedia, 2012). h. 30.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana*, Terjemahan, cetakan ke empat, Minerva, Madiun, 1976.Hal. 18
- Muhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, Cipta Budaya, Jakarta, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Ny. Roestiyah N.K., *Didaktik/Metodik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- O.C. Kaligis, *Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas : Karakter Dan Praktek Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Equality*, 11(2), 2006.
- Oemar Seno Adji, “*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya*” dalam Albert Hasibuan, ed., *Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum* (Bandung: Alumni, 1985).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Shinta Agustina, et al., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Judicial Sector Support Program, 2016).
- Slamet Kurnia, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Jurnal:

- Anisa Mufida, Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, (2020): 223–30.
- Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zīr Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *Ahkam*, Vol. 1. No. 17 (2017): 153–60.
- Dede Kania, Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Edisi 89 Mei-(Agustus 2014): 19-28.
- Eddy Omar Sharif Hiariej, United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 1, (2019): 112.
- Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir), *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2017): 156–74.
- Eka N.A.M Sihombing, Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4, (Desember 2019): 514-523.
- Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta`zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Asy-Syari`ah*, Vol. 2. No. 16 (2014), 114–120.
- Fariz Farrih Izadi, Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati Di Provinsi Aceh Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Tahkim, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2019): 130-142.
- Haliva Muharosa, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor I, (Februari 2016): 1-15.
- Hani Faurizka, Sunarto Sunarto & Adi Nugroho, Framing Analysist of Beef Import Quota Bribery Case in Partai Keadilan Sejahtera (PKS) within The Koran Tempo, *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 2, No. 1, (2014): 1-5.
- Harison Citrawan, Hak Hidup Vs. Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Dan HAM, *Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM*, Vol. 2, (2014): 1-14.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Jurnal Al'Adl IX*, no. 3 (2017): 319–36.

Inggrid Pili, Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, (Ags 2015): 169-179.

M. Ali Zaidan, Norma, Sanksi dan Teori Pidana, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No.1, (Juni 2014): 107-115.

Muhammad Maulana Hamzah, Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia, *Jurnal Studi Agama*, Vol. No. 1, (2017): 127-54.

Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *In Right*, Vol. 6. No. 2 (2017): 249–65.

Otto Cornelis Kaligis, "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas : Karakter Dan Praktek Hukum Di Indonesia," *Jurnal Equality* 11, no. 2 (2006): 151–61.

Prasetyo Budi W, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, (2016): 1–12.

R. Nazriyah, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 19, (Oktober 2012): 586-606.

Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2, (Desember 2011): 189-203;

Surahmad, Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia, *Pusdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional*, Vol. 2, No. 1, (2016): 23–30

William Schabas, Islam and the Death Penalty, *William and Mary Bill of Rights Journal*, Vol. 1, No. 4, 2000, hlm. 223

YB. Irpa, Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, *Wacana Hukum*, Vol. XXIII, (April 2017): 1-10.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Internet:

Andhika Prasetya, Wacana Hukum Pancung di Aceh, Menkum: Tak Bisa Lewat Perda, <https://news.detik.com/berita/d-3918835/wacana-hukum-pancung-di-aceh-menkum-tak-bisa-lewat-perda>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

Glendoh, *Kejahatan Korupsi*, <http://www.peatra.ac.id/english/science/social/korup.html>.

Hukum Online, Ulama Wacanakan Hukuman Potong Tangan Koruptor di Aceh, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ulama-wacanakan-hukuman-potong-tangan-koruptor-di-aceh-lt5566dacce5880/>, Diakses Pada 15 Mei 2024.

Indriyanto Seno Adji, *Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif*, Kompas Online, [http://www.kompas.com/9709/25/OPINII menu htrnl](http://www.kompas.com/9709/25/OPINII%20menu%20htrnl).

Kompas, *Tingkat Korupsi Indonesia Nomor Tiga*, 1996, Kompas Online, <http://www.kompas.com/9604/10/LN/ting.html>.

Kristian Gunawan Yapi, *Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption*, https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=7954, Diakses Pada 28 April 2024

Media Indonesia Online, Korupsi Membuat Investor Menyingkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup, <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>.

Mugirahardjo, *Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi*, Suara Pembaruan Online, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opd01/opd01.html>.